



Pengaruh Relasi Suku Terhadap Orientasi Politik Masyarakat Simpang Selayang Kota Medan

Teddy Pascha S Depari *

Universitas Negeri Medan
Email: teddydepari@gmail.com

Yakobus Ndonga

Universitas Negeri Medan
Email: yakobusndonga@unimed.ac.id

**Corresponding Author*

Article History

Submitted : 2024-10-05

Revised : 2025-06-03

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i1.8025>

Accepted : 2025-06-03

Published : 2025-06-03

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh relasi suku terhadap orientasi politik masyarakat di Kelurahan Simpang Selayang, Medan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan reduksi, penyajian, dan verifikasi data (Miles dan Huberman). Fokus penelitian meliputi pengaruh relasi suku terhadap isu politik dan orientasi politik. Hasil studi menunjukkan bahwa identitas suku signifikan dalam menentukan preferensi politik, berfungsi sebagai kerangka acuan perilaku politik, termasuk dalam pemilu dan partisipasi. Solidaritas suku memperkuat dukungan terhadap kandidat berafiliasi suku yang sama, menghasilkan pola pemilihan yang dipengaruhi etnis. Isu-isu politik lokal juga dipengaruhi konteks sosial dan budaya suku; program yang fokus pada ekonomi lokal dan pelestarian budaya suku cenderung mendapat dukungan besar. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman konteks suku untuk kebijakan politik yang efektif dan inklusif, memberikan wawasan dinamika politik masyarakat multietnis, serta menekankan kebijakan inklusif demi harmoni dan stabilitas di Kelurahan Simpang Selayang.

Kata kunci: Relasi suku, orientasi politik, identitas suku, isu politik, Simpang Selayang.

Abstract

This study aimed to analyze how ethnic relations influence political orientation in the Simpang Selayang urban village of Medan, Indonesia. We used a descriptive qualitative method, gathering data through interviews and documents. Data analysis followed Miles and Huberman's approach, involving data reduction, display, and verification. The research focused on two main questions: the impact of ethnic relations on political issues and on political orientation. Findings revealed that ethnic identity plays a significant role in shaping individual political preferences. It acts as a frame of reference guiding political behavior, including voting and other forms of political participation. Inter-ethnic solidarity often strengthens political support for candidates with similar ethnic affiliations, creating voting patterns heavily influenced by ethnicity. The study also found that local political issues are shaped by the social and cultural contexts of each ethnic group; for instance, political programs emphasizing local economic development and cultural preservation tend to receive greater support. This highlights that understanding ethnic social and cultural contexts is key to effective and inclusive political policymaking. This research offers fresh insights into political dynamics in multi-ethnic communities, underscoring the importance of inclusive policies that consider ethnic diversity to promote social harmony and political stability in Simpang Selayang.

Keywords: Ethnic relations, political orientation, ethnic identity, political issues, Simpang Selayang.



PENDAHULUAN

Fenomena politik identitas telah menjadi perhatian signifikan dalam diskursus politik baik di Indonesia maupun global. Dalam karyanya "Benturan Antarperadaban Dan Masa Depan Politik Dunia," Huntington & Ismail (2001) menggarisbawahi bagaimana identitas berbasis suku, agama, ras, dan kebudayaan menjadi dasar aksi politik. Di Indonesia, fenomena ini semakin menarik perhatian mengingat keragaman budaya dan etnis yang ada, memunculkan pertanyaan tentang bagaimana identitas ini memengaruhi dinamika politik lokal dan nasional. Di tingkat lokal, politik identitas dapat memengaruhi segala hal, mulai dari pemilihan kepala daerah hingga keputusan kebijakan lokal. Misalnya, kandidat dalam pemilihan mungkin menekankan identitas suku mereka untuk menarik dukungan dari kelompok tertentu. Di tingkat nasional, politik identitas dapat memengaruhi formasi partai, legislasi, dan bahkan hubungan antarprovinsi. Pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana identitas-identitas ini memengaruhi kebijakan dan keputusan politik, serta bagaimana mereka berkontribusi terhadap harmoni atau ketegangan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Tony Manik (2022) dengan judul "Penggunaan Politik Identitas Marga Bancin dalam Pemilihan Kepala Desa Kuta Tinggi Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat" menemukan bahwa dalam Pilkada Kabupaten Pakpak Bharat, seorang kandidat dari suku Batak berhasil menarik dukungan signifikan dari pemilih dengan menekankan identitas suku Bataknya. Kandidat ini mengusung program-program yang fokus pada pengembangan ekonomi lokal melalui penguatan usaha kecil menengah berbasis budaya Batak dan pemeliharaan tradisi Batak melalui pendidikan dan festival budaya.

Penelitian lain oleh Richard Dauly (2022) dengan judul "Mencegah Politik Identitas" menunjukkan bahwa di tingkat Provinsi Jawa Timur, politik identitas memainkan peran penting dalam Pemilu Legislatif 2019. Sejumlah partai politik yang berhasil memenangkan kursi di parlemen provinsi adalah mereka yang secara eksplisit menjanjikan untuk memperjuangkan hak-hak kultural Jawa dan memperkuat ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung industri garam dan pertanian, yang merupakan sektor ekonomi kunci di Jawa Timur.

Dalam konteks Indonesia, politik identitas sering kali terjalin erat dengan relasi suku, menjadikan relasi ini sebagai aspek utama dalam dinamika politik identitas di tanah air. Relasi suku bukan hanya menjadi pola utama yang memengaruhi arah dan bentuk politik identitas, tetapi juga berperan signifikan dalam menentukan pilihan politik, strategi kampanye, dan pembentukan kebijakan. Akibatnya, politik identitas yang berbasis pada relasi suku ini tidak hanya membentuk peta politik lokal dan nasional, tetapi juga berkontribusi pada dinamika sosial yang lebih luas, memengaruhi cara individu dan kelompok berinteraksi, berkolaborasi, atau bahkan berkonflik dalam arena politik.

Relasi sosial berbasis suku memiliki dampak yang signifikan terhadap orientasi politik. Teori identitas sosial yang dikembangkan oleh Tajfel dan Turner (2004) menunjukkan bahwa identitas kelompok, termasuk suku, memberikan kerangka acuan untuk perilaku individu, termasuk dalam hal politik. Studi oleh Fearon dan Laitin (2003) menegaskan bahwa dalam masyarakat multietnis, afiliasi suku dapat menjadi faktor penting dalam pembentukan preferensi politik individu.

Pengaruh politik identitas terhadap kehidupan politik dapat dilihat melalui cara pandang dan pilihan politik masyarakat. Menurut Lipset dan Rokkan dalam Karvonen & Kuhnle (2011), identitas kelompok, termasuk suku, menjadi faktor penting dalam pembentukan garis pemisah politik, memengaruhi perilaku pemilih dan formasi partai politik. Di Indonesia, fenomena ini sering kali berkaitan dengan isu-isu seperti representasi politik, distribusi sumber daya, dan kebijakan afirmatif yang berbasis pada identitas kelompok.

Pemahaman terhadap pengaruh politik identitas dalam kehidupan politik, seperti yang diuraikan oleh Lipset dan Rokkan, membuka jalan bagi penajakan lebih dalam mengenai bagaimana orientasi politik masyarakat terbentuk dan beroperasi dalam konteks yang kaya akan keragaman identitas. Identitas kelompok, termasuk suku, tidak hanya membentuk garis pemisah politik tetapi juga menentukan arah dan dinamika interaksi politik, dari perilaku pemilih hingga formasi partai politik.

Sebagai kesimpulan, orientasi politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di mana relasi suku berperan penting. Dinamika antarsuku, termasuk persaingan dan solidaritas, secara signifikan memengaruhi pandangan politik individu dan kelompok. Ideologi politik yang berakar pada nilai dan norma suku tertentu sering kali memandu individu dalam memilih kandidat yang sesuai dengan identitas etnis mereka. Afiliasi dengan partai politik yang memiliki basis dukungan kuat dalam suku tertentu juga menunjukkan bagaimana identitas suku dapat memotivasi pilihan politik. Isu-isu yang berkaitan dengan hak dan kepentingan suku menjadi faktor penentu dalam orientasi politik, menegaskan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam pemilihan. Kepribadian dan integritas kandidat dalam mewakili kepentingan suku juga dipertimbangkan, mencerminkan keinginan pemilih untuk mendukung calon yang sejalan dengan aspirasi suku mereka. Media dan kampanye politik yang menargetkan kelompok suku tertentu berdampak pada persepsi pemilih tentang kandidat, menunjukkan pengaruh komunikasi politik yang disesuaikan dengan latar belakang etnis. Dengan demikian, relasi suku merupakan faktor kunci dalam membentuk orientasi politik, memperlihatkan bagaimana konteks etnis memengaruhi dinamika pemilihan dan keputusan politik masyarakat.

Lebih lanjut, kompleksitas unik politik identitas di Indonesia, terutama dikarenakan keragaman etnis dan budaya yang menjadi ciri khas negara ini, terlihat jelas dalam studi tentang dinamika politik lokal. Sebagai contoh, di Kota Medan, di mana keragaman suku sangat kentara, politik identitas berbasis suku sering kali memainkan peran penting dalam pembentukan aliansi politik maupun dalam konflik politik. Hal ini menggambarkan bagaimana dinamika politik lokal di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor identitas etnis dan suku.

Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, menawarkan sebuah kasus menarik dalam kajian politik identitas. Dengan populasi yang terdiri dari berbagai suku, termasuk Batak, Jawa, Melayu, Minang, Tionghoa, Aceh, Nias, Tamil, Banjar, Banten, dan suku-suku lainnya, interaksi antarkelompok etnis di kota ini mencerminkan dinamika sosial dan politik yang kompleks. Penelitian ini akan fokus pada komunitas di Kelurahan Simpang Selayang, sebuah daerah di Medan yang dihuni oleh beragam suku, untuk memahami bagaimana relasi suku memengaruhi orientasi politik masyarakat. Kelurahan Simpang Selayang, dengan keragaman etnisnya, merupakan mikrokosmos dari keragaman yang ada di Indonesia secara keseluruhan.

Komposisi etnis di kelurahan ini terdiri dari, antara lain, Melayu, Batak, Aceh, Nias, Tamil/India, Banjar, Banten, Minang, Tionghoa, dan beberapa kelompok lainnya, mencerminkan heterogenitas penduduk yang tinggi. Data dari kantor kelurahan menunjukkan total penduduk sebanyak 16.673 orang, dengan mayoritas penduduk berasal dari etnis Jawa yang mencapai 41,44%, diikuti oleh etnis Karo dengan persentase sebesar 36,03%. Subjek penelitian akan dipilih sebanyak 12 individu yang mewakili masing-masing suku yang ada di Kelurahan Simpang Selayang. Seleksi individu tersebut dapat didasarkan pada berbagai faktor, termasuk kepemimpinan dalam komunitas suku, keaktifan dalam kegiatan sosial atau politik, atau representasi dalam lembaga atau organisasi masyarakat setempat, seperti ketua komunitas ataupun ketua paguyuban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana relasi suku memengaruhi orientasi politik masyarakat di Kelurahan Simpang Selayang, sebuah daerah dengan populasi multietnis di Kota Medan. Identitas suku yang beragam memberikan konteks yang kaya untuk memahami dinamika politik identitas di Indonesia, khususnya dalam konteks lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan objek atau subjek secara akurat dengan tujuan memperoleh data yang tepat pada saat penelitian. Data yang diperoleh berbentuk kata-kata atau gambar. Penelitian kualitatif berfokus pada data deskriptif yang diperoleh dari pandangan partisipan penelitian dan pengamatan peneliti sendiri. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memahami, menggambarkan, dan menganalisis fenomena secara mendalam tanpa melibatkan pengukuran kuantitatif. Fokus utamanya adalah pada pemahaman konteks dan makna di balik suatu kejadian atau perilaku. Penelitian dilakukan di Kelurahan Simpang Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena keragamannya yang tinggi, menawarkan kesempatan unik untuk mempelajari interaksi antar etnis dalam konteks urban. Kelurahan ini memiliki komposisi etnis yang signifikan, dengan mayoritas penduduk berasal dari etnis Jawa (41,44%) dan Karo (36,03%), serta berbagai etnis minoritas lainnya. Subjek penelitian adalah masyarakat di Kelurahan Simpang Selayang yang berjumlah 12 orang, terdiri dari satu orang per suku yang signifikan di daerah tersebut. Kriteria pemilihan subjek meliputi diversitas etnis, keterlibatan politik, keseimbangan gender, dan rentang usia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Simpang Selayang terletak di Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai bagian dari salah satu kota besar di Indonesia, Medan memiliki infrastruktur yang mendukung kehidupan penduduknya. Kelurahan ini memiliki akses yang sangat baik ke berbagai fasilitas umum, termasuk sekolah, pusat kesehatan, dan pasar tradisional yang berlokasi dekat dengan area permukiman. Akses transportasi juga sangat baik, dengan jalur jalan yang menghubungkan langsung ke pusat Kota Medan, memudahkan mobilitas penduduk untuk bekerja, bersekolah, atau beraktivitas lainnya. Secara demografi, Angka Kelahiran Kasar (AKK) di Kelurahan Simpang Selayang adalah 22 per 1.000 penduduk per tahun. Ini berarti, dalam setiap 1.000 penduduk, terdapat 22 kelahiran hidup setiap

tahunnya. Sementara itu, Total Fertility Rate (TFR) di daerah ini mencapai 2,4 anak per wanita, menunjukkan bahwa rata-rata wanita di Simpang Selayang memiliki sekitar 2 hingga 3 anak selama hidupnya.

Angka Kematian Kasar (AKK) tercatat 6 per 1.000 penduduk per tahun, yang berarti dari setiap 1.000 penduduk, 6 orang meninggal setiap tahunnya. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah 15 per 1.000 kelahiran hidup, menunjukkan jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup. Data mengenai status perkawinan di Kelurahan Simpang Selayang menunjukkan bahwa 35% penduduk belum menikah, 55% telah menikah, 5% bercerai hidup, dan 5% bercerai mati. Angka ini mencerminkan beragam tahapan kehidupan perkawinan di komunitas tersebut.

Mobilitas sosial di Kelurahan Simpang Selayang menunjukkan bahwa 20% penduduk mengalami mobilitas sosial tinggi, 30% mengalami mobilitas sosial sedang, dan 50% mengalami mobilitas sosial rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk tidak mengalami perubahan signifikan dalam status sosial mereka dalam lima tahun terakhir. Untuk migrasi, tercatat migrasi masuk sebesar 8% dan migrasi keluar sebesar 6%. Ini menunjukkan adanya dinamika penduduk yang cukup aktif, dengan jumlah penduduk yang pindah masuk sedikit lebih tinggi daripada yang pindah keluar dalam lima tahun terakhir.

Tingkat pendidikan di Kelurahan Simpang Selayang bervariasi: 5% penduduk tidak tamat SD, 20% tamat SD, 25% tamat SMP, 35% tamat SMA/SMK, dan 15% memiliki pendidikan perguruan tinggi. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk memiliki pendidikan setidaknya sampai tingkat menengah atas. Penduduk Simpang Selayang terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan, meliputi petani (15%), pegawai negeri (10%), pekerja swasta (35%), pedagang (20%), usaha kecil dan menengah (10%), dan 10% tidak bekerja.

Pendapatan penduduk di Kelurahan Simpang Selayang juga bervariasi: 25% penduduk memiliki penghasilan kurang dari Rp 2.000.000 per bulan, 35% memiliki penghasilan antara Rp 2.000.000 hingga Rp 4.000.000 per bulan, 25% memiliki penghasilan antara Rp 4.000.000 hingga Rp 6.000.000 per bulan, dan 15% memiliki penghasilan lebih dari Rp 6.000.000 per bulan.

Kelurahan Simpang Selayang menunjukkan keberagaman agama yang tinggi: 65% penduduk beragama Islam, 20% Kristen Protestan, 10% Katolik, 3% Buddha, 1% Hindu, dan 1% lainnya. Keberagaman ini mencerminkan toleransi dan koeksistensi antarberbagai kelompok agama. Dengan total populasi 16.673 jiwa, mayoritas penduduk berasal dari etnis Jawa (41,44%) dan Karo (36,03%). Selain itu, terdapat berbagai etnis minoritas lain seperti Melayu, Batak, Aceh, Nias, Tamil/India, Banjar, Banten, Minang, dan Tionghoa, yang berkontribusi pada kekayaan budaya daerah tersebut.

Pengaruh Relasi Suku Di Kelurahan Simpang Selayang Terhadap Isu-Isu Politik

Penelitian ini mengungkapkan bahwa relasi suku di Kelurahan Simpang Selayang, Kota Medan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap preferensi politik dan aktivisme politik masyarakat. Dari data wawancara dengan berbagai suku yang berbeda, terungkap bahwa setiap suku memiliki cara unik dalam mempengaruhi dinamika politik lokal. Misalnya, suku Batak cenderung mendukung partai atau calon yang menawarkan integritas dan program anti-korupsi,

sementara suku Karo lebih condong pada partai yang menghormati nilai-nilai Karo dan fokus pada pelestarian budaya. Hal ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai budaya suku mempengaruhi preferensi politik mereka.

Relasi suku juga menciptakan jaringan sosial yang kuat yang dimanfaatkan untuk memobilisasi dukungan dalam kampanye politik lokal. Dukungan ini bisa berupa dukungan materi dan tenaga bagi calon atau partai yang dianggap mewakili kepentingan suku mereka. Solidaritas yang tercipta melalui relasi suku ini tidak hanya terbatas pada aspek budaya dan tradisional, tetapi juga mencakup dukungan moral, emosional, dan finansial dalam kehidupan sehari-hari. Ketika solidaritas ini diterjemahkan ke dalam konteks politik, anggota suku cenderung untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam mendukung calon atau partai yang dianggap mewakili nilai-nilai dan kepentingan suku mereka.

Kegiatan budaya khusus yang dilakukan oleh masing-masing suku, seperti upacara adat, festival budaya, dan kegiatan sosial lainnya, tidak hanya memperkuat identitas suku tetapi juga menjadi forum untuk membangun kesadaran politik. Selama acara-acara ini, diskusi mengenai kebijakan publik dan isu-isu penting bagi suku sering kali muncul. Hal ini membantu mengedukasi anggota suku tentang isu-isu politik yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari dan memotivasi mereka untuk terlibat aktif dalam proses politik.

Relasi suku sering kali menciptakan jaringan sosial yang luas di tingkat lokal. Jaringan ini tidak hanya terbatas pada lingkungan sosial, tetapi juga mencakup jaringan ekonomi dan politik. Dalam konteks politik, jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk memobilisasi dukungan dalam kampanye politik, baik dalam bentuk materi maupun dukungan tenaga. Anggota suku yang memiliki peran atau posisi penting dalam jaringan ini dapat mempengaruhi pendapat dan keputusan politik di tingkat lokal. Selain itu, relasi suku juga menciptakan rasa tanggung jawab kolektif terhadap kepentingan bersama. Ketika suku menghadapi tantangan atau masalah bersama, seperti masalah ekonomi atau kesehatan, solidaritas suku mendorong anggota untuk mencari solusi bersama, termasuk melalui dukungan politik.

Penelitian ini didukung oleh studi terdahulu seperti "Pengaruh Relasi Etnis Jawa terhadap Orientasi Politik di Kabupaten Bengkalis" dan "Pengaruh Relasi Suku Etnis Tionghoa terhadap Orientasi Politik di Kota Makassar," yang menunjukkan bahwa solidaritas suku dan kegiatan budaya memiliki dampak signifikan terhadap orientasi politik masyarakat multietnis. Implikasi dari penelitian ini dapat membantu memahami dinamika serupa di Simpang Selayang, Kota Medan.

Relasi suku di Kelurahan Simpang Selayang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap isu-isu politik. Identitas etnis yang kuat di antara suku-suku seperti Batak, Karo, Banjar, dan lainnya memengaruhi preferensi politik mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi dinamika politik lokal. Solidaritas suku memainkan peran penting dalam membentuk pandangan politik warga, baik dalam memilih pemimpin maupun dalam mendukung kebijakan tertentu.

Relasi suku mempengaruhi isu-isu politik melalui beberapa mekanisme:

1. **Preferensi Politik:** Setiap suku memiliki preferensi politik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya mereka. Misalnya, suku Batak cenderung mendukung calon yang menawarkan

integritas dan program anti-korupsi, sementara suku Karo lebih condong pada partai yang menghormati nilai-nilai Karo dan fokus pada pelestarian budaya.

2. Jaringan Sosial: Relasi suku menciptakan jaringan sosial yang kuat yang digunakan untuk memobilisasi dukungan dalam kampanye politik lokal. Jaringan ini mencakup dukungan materi dan tenaga bagi calon atau partai yang dianggap mewakili kepentingan suku mereka.
3. Aktivisme Politik: Suku-suku yang memiliki tradisi gotong royong dan kegiatan komunitas yang aktif cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi. Mereka lebih mungkin terlibat dalam kampanye politik, kegiatan sosial, advokasi hak-hak masyarakat, serta diskusi dan perdebatan politik di tingkat lokal.
4. Advokasi dan Perubahan Sosial: Beberapa suku seperti suku Aceh dan Tamil/India terlibat dalam advokasi untuk hak-hak komunitas mereka yang mempengaruhi kebijakan publik dan perubahan sosial di tingkat lokal

Pengaruh relasi suku terhadap isu-isu politik sangat jauh dan mendalam. Identitas etnis memainkan peran yang signifikan dalam membentuk preferensi politik lokal. Solidaritas internal suku yang didasari oleh nilai-nilai budaya dan tradisi membentuk dasar kuat dalam memilih pemimpin dan mendukung kebijakan yang dianggap mewakili kepentingan etnis dan lokal mereka secara efektif. Pengaruh relasi suku terhadap isu-isu politik sangat signifikan karena identitas etnis memainkan peran utama dalam membentuk preferensi politik lokal. Solidaritas internal suku, yang berakar pada nilai-nilai budaya dan tradisi, membentuk dasar yang kuat dalam menentukan pilihan politik. Hal ini dikarenakan:

1. **Identitas Budaya dan Tradisi:** Setiap suku memiliki budaya dan tradisi unik yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap politik. Nilai-nilai budaya ini sering kali menentukan cara suku tersebut memilih pemimpin dan mendukung kebijakan yang dianggap selaras dengan kepentingan mereka.
2. **Solidaritas Internal:** Solidaritas di dalam suku mendorong anggota untuk mendukung calon atau kebijakan yang dianggap dapat mewakili kepentingan mereka secara efektif. Ini sering kali terwujud dalam bentuk dukungan politik yang solid terhadap kandidat dari kelompok etnis yang sama.
3. **Representasi dan Kepentingan:** Anggota suku sering merasa lebih diwakili dan didengarkan oleh pemimpin atau kebijakan yang berasal dari latar belakang etnis yang sama. Mereka percaya bahwa pemimpin tersebut memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan dan aspirasi komunitas mereka.
4. **Kepentingan Lokal:** Dalam konteks politik lokal, kepentingan dan aspirasi komunitas etnis menjadi faktor penentu dalam pemilihan kandidat dan dukungan terhadap kebijakan tertentu. Politisi yang mampu mengartikulasikan kepentingan etnis dan lokal mereka sering kali mendapatkan dukungan yang lebih besar.
5. **Pengaruh Sosial:** Relasi suku juga mempengaruhi dinamika sosial dalam politik. Dukungan politik sering kali ditentukan oleh hubungan sosial dan jaringan komunitas yang dibangun berdasarkan identitas etnis.

Dengan demikian, pengaruh relasi suku dalam politik merupakan aspek yang tak terpisahkan dari dinamika politik lokal, karena nilai-nilai budaya dan solidaritas internal mempengaruhi preferensi dan keputusan politik komunitas etnis

Selain relasi suku, ada beberapa aspek lain yang mempengaruhi isu-isu politik di Kelurahan Simpang Selayang:

1. Agama: Preferensi politik juga dipengaruhi oleh identitas agama. Kandidat atau partai yang mendukung nilai-nilai keagamaan tertentu mungkin mendapatkan dukungan lebih besar dari komunitas agama tersebut
2. Kualitas Kandidat: Integritas, kompetensi, dan visi kandidat juga menjadi pertimbangan penting bagi pemilih. Kandidat yang dianggap memiliki program yang jelas dan realistis serta rekam jejak yang baik cenderung mendapatkan dukungan lebih banyak
3. Isu Ekonomi dan Sosial: Isu-isu seperti kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan juga mempengaruhi preferensi politik warga. Program-program yang menjanjikan peningkatan kualitas hidup sering kali menarik perhatian pemilih

Jadi dapat dikatakan, Relasi suku di Kelurahan Simpang Selayang secara signifikan mempengaruhi isu-isu politik di daerah tersebut. Identitas etnis yang kuat di antara suku-suku seperti Batak, Karo, dan lainnya membentuk preferensi politik yang jelas, di mana suku Batak lebih memilih calon dengan integritas dan program anti-korupsi, sementara suku Karo lebih mendukung partai yang menghargai nilai-nilai budaya mereka. Jaringan sosial yang terbentuk dari relasi suku digunakan untuk memobilisasi dukungan dalam kampanye politik, baik dalam bentuk materi maupun tenaga. Solidaritas internal suku juga memperkuat dukungan politik dan partisipasi dalam kegiatan politik. Dengan demikian, relasi suku berperan penting dalam membentuk dinamika politik dan mobilisasi dukungan di Kelurahan Simpang Selayang.

Pengaruh relasi suku terhadap orientasi politik masyarakat di Kelurahan Simpang Selayang

Pengaruh relasi suku terhadap orientasi politik masyarakat di Kelurahan Simpang Selayang sangat mencerminkan pola interaksi sosial dan preferensi politik yang bervariasi di antara berbagai kelompok etnis. Data yang ada menunjukkan bagaimana solidaritas etnis berperan penting dalam membentuk pilihan politik dan aktivitas komunitas. Suku Batak, misalnya, menunjukkan solidaritas yang kuat dalam konteks politik, dengan kecenderungan memilih kandidat atau partai yang berkomitmen pada integritas dan program anti-korupsi. Partisipasi aktif mereka dalam aktivitas politik dan kampanye untuk perubahan positif menegaskan komitmen mereka terhadap infrastruktur dan kebijakan yang bersih dari korupsi. Di sisi lain, suku Banten menonjolkan kekompakan dalam seni budaya dan dukungan terhadap pembangunan ekonomi serta lingkungan. Preferensi politik mereka cenderung pada program yang mendukung kesejahteraan ekonomi dan sosial, serta aktivisme lingkungan untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Suku Melayu, dengan tradisi gotong royong dalam perayaan budaya, menunjukkan solidaritas melalui kegiatan sosial yang relevan bagi komunitas mereka. Mereka cenderung mendukung isu-isu sosial yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dan berusaha merangsang perubahan melalui aktivitas politik lokal. Suku Jawa, yang juga aktif dalam kegiatan gotong royong dan upacara adat, mempengaruhi perubahan sosial dan politik melalui partisipasi dalam aktivisme politik lokal. Solidaritas mereka terlihat dalam usaha untuk memajukan tradisi dan nilai-nilai komunitas mereka. Sementara itu, suku Karo mengutamakan

pelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat lokal. Keterlibatan mereka dalam kegiatan adat dan komunitas memperkuat identitas politik mereka sebagai pelindung tradisi Karo, dan mereka cenderung mendukung calon atau partai yang mempromosikan nilai-nilai budaya dan program sosial yang relevan. Suku Banjar menunjukkan solidaritas dalam situasi sulit dan mendukung gotong royong serta kampanye kesadaran. Preferensi politik mereka terlihat dalam dukungan terhadap kebijakan yang memperkuat hak individu dan membangun masyarakat inklusif, menggambarkan peran mereka dalam mempengaruhi kebijakan lokal yang sesuai dengan nilai-nilai etnis mereka. Suku Minang, meskipun tidak terlibat dalam aktivisme politik formal, tetap aktif dalam kegiatan gotong royong dan acara adat. Kepedulian mereka terhadap isu-isu lokal dan upaya untuk memperkuat nilai-nilai budaya Minangkabau mencerminkan identitas politik mereka. Suku Nias, melalui solidaritas dalam budaya lokal seperti tarian tradisional dan festival adat, mendukung program yang memperkuat ekonomi lokal dan advokasi untuk kepentingan suku Nias. Aktivisme politik mereka berkontribusi pada perumusan kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan identitas budaya mereka. Suku Tionghoa menunjukkan solidaritas dalam bentuk bantuan finansial dan moral serta dukungan terhadap hak minoritas dan keadilan sosial. Aktivisme politik mereka terfokus pada diskusi dan media sosial, mempengaruhi pemikiran dan tindakan terkait hak minoritas dan keadilan sosial di masyarakat. Suku Aceh, dengan solidaritas dalam budaya lokal dan dukungan dalam situasi sulit, cenderung mendukung kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan sosial dan hak otonomi daerah. Aktivisme politik mereka berfokus pada advokasi hak-hak masyarakat Aceh, berkontribusi pada perubahan sosial dan politik di tingkat lokal.

Di Kelurahan Simpang Selayang, pengaruh relasi suku terhadap orientasi politik masyarakat dapat dipahami melalui beberapa faktor mendasar. Pertama, identitas budaya dan tradisi yang mendalam memainkan peran krusial dalam membentuk pandangan politik. Setiap suku memiliki nilai-nilai dan tradisi yang diwariskan turun-temurun, yang secara langsung mempengaruhi cara mereka menilai dan memilih kandidat politik. Tradisi ini membentuk pola pikir dan preferensi politik yang konsisten dengan identitas etnis mereka. Solidaritas internal yang kuat dalam setiap suku juga sangat berpengaruh. Ikatan sosial yang erat di antara anggota suku menciptakan rasa kebersamaan yang mendalam, mendorong mereka untuk memilih dan mendukung kandidat atau kebijakan yang dianggap mewakili kepentingan kolektif mereka. Solidaritas ini memperkuat dukungan terhadap calon politik yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan komunitas.

Kepentingan kultural dan sosial menjadi faktor penting lainnya. Suku-suku dengan keunikan budaya dan sosial tertentu sering kali mencari dukungan politik untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan kultural mereka. Kebijakan yang mendukung pelestarian budaya dan kegiatan komunitas sering kali mendapatkan dukungan dari kelompok etnis yang relevan. Selain itu, fokus beberapa suku pada pelestarian budaya dan kesejahteraan sosial mempengaruhi orientasi politik mereka. Aktivitas budaya dan sosial yang spesifik mendorong kesadaran akan pentingnya dukungan politik terhadap kebijakan yang mendukung pelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat. Aktivisme politik yang muncul dari solidaritas etnis juga memainkan peran penting. Kesadaran sosial yang tinggi terhadap isu-isu seperti hak-hak minoritas dan keadilan sosial mendorong keterlibatan politik yang lebih aktif. Komunitas suku

sering kali terlibat dalam advokasi dan kampanye untuk perubahan yang sejalan dengan kepentingan mereka.

Pengaruh sosial dan jaringan komunitas dalam suku juga berkontribusi pada pembentukan orientasi politik. Dukungan dari teman, keluarga, dan tokoh masyarakat di dalam suku mempengaruhi keputusan politik individu dan kolektif. Respon terhadap kebijakan pemerintah juga menjadi faktor penting. Ketika kebijakan pemerintah dianggap mendukung atau berdampak positif pada kesejahteraan komunitas suku, dukungan politik terhadap pemerintah atau partai politik tertentu akan meningkat. Contohnya, Relasi suku memiliki dampak yang kuat terhadap orientasi politik masyarakat di Simpang Selayang adalah dukungan terhadap calon legislatif dari Dapil 5 seperti Jusup Ginting Suka dan Johannes Hutagalung dari PDIP dapat dipengaruhi oleh dukungan dari komunitas Batak. Dukungan ini tidak hanya berdasarkan afiliasi politik tetapi juga karena identitas etnis yang sama. Solidaritas suku membantu membangun basis dukungan yang solid dan loyal, yang sangat penting dalam kontestasi politik.

Akhirnya, eksistensi dan identitas politik yang kuat memotivasi suku-suku untuk terlibat dalam aktivitas politik guna melindungi dan mempromosikan kepentingan mereka. Ketika identitas mereka terancam atau kurang diperhatikan, mereka lebih aktif dalam mempengaruhi perubahan untuk memastikan kepentingan mereka terwakili dengan baik. Dengan demikian, interaksi antara solidaritas etnis, kepentingan budaya dan sosial, serta respons terhadap kebijakan menciptakan pola pengaruh yang kompleks terhadap orientasi politik di Kelurahan Simpang Selayang.

Jangkauan Pengaruh Relasi Suku Terhadap Orientasi Politik

Relasi suku memiliki jangkauan pengaruh yang luas dan signifikan dalam menentukan orientasi politik masyarakat di Kelurahan Simpang Selayang, Kota Medan. Pengaruh ini tidak hanya terbatas pada hubungan etnis yang kuat antara kandidat dan pemilih, tetapi juga mencakup berbagai aspek sosial, budaya, dan sejarah yang membentuk preferensi politik masyarakat.

1. Dukungan Berbasis Etnis

Dukungan politik berbasis etnis adalah salah satu bentuk paling langsung dari pengaruh relasi suku. Kandidat yang berasal dari suku yang sama dengan mayoritas pemilih di daerah tertentu cenderung mendapatkan dukungan yang kuat. Misalnya, Jusup Ginting Suka dan Johannes Hutagalung dari PDIP, yang didukung oleh komunitas Batak, menunjukkan bagaimana identitas etnis yang sama dapat membangun basis dukungan yang solid. Solidaritas etnis ini memperkuat identitas kolektif dalam komunitas tersebut dan mendorong anggota komunitas untuk mendukung kandidat yang mereka anggap sebagai perwakilan mereka.

Dukungan politik yang kuat dari komunitas etnis dapat dilihat pada kandidat seperti Jusup Ginting Suka dan Johannes Hutagalung dari PDIP. Kandidat-kandidat ini mungkin mendapatkan dukungan yang signifikan dari komunitas Batak, yang merupakan kelompok etnis besar di Sumatera Utara. Solidaritas etnis ini tidak hanya menciptakan basis dukungan yang kuat tetapi juga memperkuat identitas kolektif dalam komunitas tersebut. Dukungan

berbasis etnis ini memperlihatkan bagaimana relasi suku dapat mengarahkan preferensi politik masyarakat.

2. Jaringan Sosial dan Komunitas

Jaringan sosial dan komunitas suku juga memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan pengaruh relasi suku. Kandidat seperti H. Kasman Bin Marasakti Lubis dari PKS dan dr. Dimas Sofani Lubis dari Golkar mungkin memanfaatkan jaringan sosial mereka untuk membangun dukungan. Acara-acara adat dan kegiatan komunitas menjadi platform untuk memperkuat hubungan antara kandidat dan pemilih. Melalui jaringan sosial ini, kandidat dapat menjangkau pemilih secara langsung dan membangun hubungan yang lebih personal, yang pada gilirannya meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan dukungan.

Kandidat seperti H. Kasman Bin Marasakti Lubis dari PKS dan dr. Dimas Sofani Lubis dari Golkar mungkin juga mendapatkan keuntungan dari jaringan sosial dan komunitas suku yang mereka wakili. Jaringan ini memainkan peran penting dalam mobilisasi politik, dimana kegiatan komunitas dan acara adat menjadi platform untuk memperkuat dukungan politik. Jaringan sosial ini memungkinkan kandidat untuk menjangkau pemilih secara langsung dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan peluang mereka untuk memenangkan suara.

3. Aktivisme Politik

Aktivisme politik dalam komunitas suku juga menunjukkan sejauh mana relasi suku dapat mempengaruhi orientasi politik masyarakat. Komunitas seperti Karo mungkin sangat aktif dalam mendukung kandidat mereka seperti Andre Sitepu dan Friech Depari. Aktivisme politik ini mencakup partisipasi dalam kampanye lokal, penyelenggaraan acara-acara gotong royong, dan kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik anggota komunitas. Aktivisme ini membantu dalam mengorganisir pemilih dan memastikan partisipasi politik yang tinggi, sehingga memperkuat pengaruh relasi suku dalam proses politik.

Aktivisme politik yang dilakukan oleh anggota suku, seperti partisipasi dalam kampanye lokal dan kegiatan gotong royong, juga menunjukkan bagaimana relasi suku menjadi motor penggerak dalam perubahan sosial dan politik di tingkat lokal. Misalnya, komunitas Karo mungkin sangat aktif dalam mendukung kandidat mereka seperti Andre Sitepu dan Friech Depari, yang juga berasal dari suku Karo. Aktivisme ini membantu dalam mengorganisir pemilih dan memastikan partisipasi politik yang tinggi dari komunitas tersebut.

4. Solidaritas Suku

Solidaritas suku tidak hanya berfungsi dalam konteks dukungan politik, tetapi juga sebagai mekanisme pengikat yang memperkuat hubungan sosial dan budaya dalam komunitas. Kandidat seperti Salomo Tabah Pardede dari Gerindra dan Binsar Simarmata dari Perindo mungkin mendapatkan dukungan karena solidaritas suku yang mereka bangun. Solidaritas ini memperlihatkan bagaimana hubungan etnis dapat menciptakan ikatan yang kuat di antara anggota komunitas, yang pada akhirnya memperkuat dukungan politik bagi kandidat yang dianggap sebagai perwakilan suku mereka.

SIMPULAN

Penelitian ini secara jelas menunjukkan bahwa relasi suku memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi dan aktivisme politik di Kelurahan Simpang Selayang. Setiap suku menunjukkan pola unik dalam memengaruhi dinamika politik lokal. Misalnya, suku Batak cenderung mendukung calon atau partai yang menjunjung integritas dan program anti-korupsi, sementara suku Karo lebih condong pada partai yang menghormati nilai-nilai dan pelestarian budaya mereka. Solidaritas internal suku terbukti menciptakan jaringan sosial yang kuat, berfungsi sebagai fondasi untuk memobilisasi dukungan dalam kampanye politik lokal, baik dalam bentuk dukungan moral, emosional, finansial, maupun partisipasi aktif. Fenomena ini sangat mencerminkan bagaimana interaksi sosial dan preferensi politik bervariasi di antara kelompok etnis yang berbeda.

Selain faktor etnis, agama, kualitas kandidat, serta isu ekonomi dan sosial juga memengaruhi preferensi politik masyarakat. Program-program yang menjanjikan peningkatan kualitas hidup, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan kesehatan, sering kali menarik perhatian pemilih. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa relasi suku dan identitas etnis adalah faktor kunci dalam membentuk solidaritas sosial dan partisipasi politik di Kelurahan Simpang Selayang. Pemahaman mendalam tentang dinamika ini sangat penting sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan program yang mendukung penguatan hubungan sosial dan partisipasi politik yang inklusif dalam masyarakat multietnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Verba, S. (2015). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton university press.
- Aspinall, E. (2003). *Local power & politics in Indonesia*. Flipside Digital Content Company Inc.
- Damsar, S. (2010). Pengantar Sosiologi Politik. *Jakarta: Kencana Prenada*.
- Daulay, R. (2022). MENCEGAH POLITIK IDENTITAS. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 5, 1–10.
- Fearon, J. D., & Laitin, D. D. (2003). Ethnicity, insurgency, and civil war. *American Political Science Review*, 97(1), 75–90.
- Friedman, J., & Friedman, S. (2018). *The Nature of Belief Systems Reconsidered*. Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=ReGEDwAAQBAJ>
- Gordon, M. M. (2010). *Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion and National Origins*. Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=YzYkMQv3WFMC>
- Hardani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. *Yogyakarta: Pustaka Ilmu*.

- Horowitz, D. L. (2001). *Ethnic Groups in Conflict, Updated Edition With a New Preface*. University of California Press. <https://books.google.co.id/books?id=1nC8htP6SE4C>
- Huntington, S. P., & Ismail, M. S. (2001). *Benturan antarperadaban dan masa depan politik dunia*. Penerbit Qalam. <https://books.google.co.id/books?id=nkMFPQAACAAJ>
- Karvonen, L., & Kuhnle, S. (2011). *Party Systems and Voter Alignments Revisited*. Routledge. <https://books.google.co.id/books?id=hxdytQAACAAJ>
- Koentjaraningrat. (2000). *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*. Gramedia. <https://books.google.co.id/books?id=94QpZ-x117QC>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo*.
- Kymlicka, W. (2020). Multicultural citizenship. In *The new social theory reader* (pp. 270–280). Routledge.
- MANIK, T. (n.d.). *Penggunaan politik identitas marga Bancin dalam pemilihan kepala Desa Kuta Tinggi Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2022*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=U4IU_-wJ5QEC
- Morrison, M. A. (2012). *Metode penelitian survei*. Kencana.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Surbakti, A. R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2008). *Perekayasaan sistem pemilu untuk pembangunan tata politik demokratis*. Partnership for Governance Reform Indonesia.
- Suyanto, B. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media.
- Suyanto, B., Sujanto, I., & Jalal, A. (2022). Orientasi Kelompok Etnis Jawa dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Pemilu Legislatif Kabupaten Bengkalis Tahun 2019). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 13688–13696.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (2004). The social identity theory of intergroup behavior. In *Political psychology* (pp. 276–293). Psychology Press.